SINERGi



Terus Fokus Bantu Bencana
Doa dan Peduli untuk semua

Menggesa Kebijakan & Anggaran Pro Rakyat

DAFTAR ISI

3 Tajuk Redaksi
4 Kata Pengantar
6 **Rubrik 1 Menakar Akar Demokrasi dan Kematangan Elite**
7 Kekuatan Ideologi Menuju Demokrasi yang Berkualitas
12 **Rubrik 2 Republik Yang Berjanji, Negara Yang Menghindar**
13 HAM 2025: Republik yang Berjanji, Negara yang Menghindar
18 **Rubrik 3 Politik Anggaran Dan Arah Kebijakan Pro-rakyat**
19 APBD dan Nasib Rakyat: Membaca Anggaran Daerah
23 Siapa yang Sebenarnya Dilayani Negara?
28 Fahmi Muhammad Hanif, Dari Jalan Mantap hingga Akar Kehidupan
33 Riza Falepi dan Warisan Kepemimpinan yang Dikenang Payakumbuh
39 **Rubrik 4 Integritas Sebagai Jalan Politik Yang Bermartabat**
41 PKS Dorong Tata Kelola Legislatif yang Transparan dan Berkeadilan
44 Rekam Jejak Fraksi PKS dalam Isu HAM
46 **Rubrik 5 Integritas Pejabat Publik: Dari Keluarga Hingga Kendali Organisasi**
47 Dari Mandat Ke Kendali
50 Menata Kebijakan Publik yang Mensejahterakan Rakyat
54 Rubrik 6 Kemanusiaan Tanpa Musim: Dari Respons Cepat Ke Pemulihan
55 Sekjen PKS Resmikan Instalasi Air Bersih dan Listrik Tenaga Surya di Aceh Tamiang
58 Kerja Kemanusiaan Tidak Boleh Musiman
62 **Rubrik 7 Esei Analisis Psikologi Politik**
63 Merawat Api yang Hampir Padam: Sebuah Anatomi Psikologis Kader
68 Epilog: Politik Yang Melayani

TIM PENGARAH: ● Presiden PKS ● Sekjen PKS ● Ketua BP3U ● Ketua Fraksi PKS DPR RI ● Ketua KSP. ● Ketua Bidang Komdigi **TIM PENGARAH KONTEN** ● Ketua BP3U Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si. ● Sekretaris BP3U dr. H. Pamungkas Hendra Kusuma ● Wakil Sekretaris BP3U Arief Rahman Hakim, S.I.Kom ● Kabiro Pembinaan Pejabaf Publik: Teddy Rusmawan, AT., MM. ● Kabiro Data Perencanaan: dr. Helmi Budiman, MM. ● Kabiro Monev: Dr. H. Agung Budi Margono, ST., MT. ● Kabiro Pembinaan Keluarga Pejabat Publik: Hj. Nevi Zaurina ● Kabiro Sistem Pendukung : H. Riza Falepi, ST., MT. **TIM REDAKSI** ● Chairoman J. Putro, B.Eng., M.Si. ● Dr. Apiatno, SE, MSi ● Daud Abdullah, STP **TIM PRODUKSI** ● Hafidz Muftisany ● Adiela ● Lisa Epriani ● Faiz Ayyas ● Boy Hamidy

Dari Bencana ke Keadilan Sosial

Kebijakan Publik di Tengah Ujian Kemanusiaan

Edisi 03 Sinergi lahir di tengah negeri yang belum sepenuhnya kering dari air mata bencana. Dari banjir, longsor, hingga gempa, kita menyaksikan satu hal yang tak boleh putus: kerja dan kepedulian yang berlanjut. Bukan kerja seremonial, bukan empati musiman. Melainkan kehadiran nyata struktur dan pejabat publik yang tetap berdiri di garis depan, saat kamera sudah lama pergi.

Di edisi ini, kami mencatat—dengan jujur dan kritis—bagaimana respons bencana seharusnya tidak berhenti pada tanggap darurat. Ia menuntut kesinambungan: rehabilitasi yang masuk akal, pemulihan yang manusiawi, dan kebijakan yang berpihak pada korban, bukan sekadar laporan kinerja.

Pembahasan kebijakan publik dan anggaran pro-rakyat menjadi poros penting. Anggaran bukan angka dingin di meja rapat; ia adalah sikap politik. Ke mana uang negara diarahkan, di situlah keberpihakan diuji

Karena itu, pembahasan kebijakan publik dan anggaran pro-rakyat menjadi poros penting. Anggaran bukan angka dingin di meja rapat; ia adalah sikap politik. Ke mana uang negara diarahkan, di situlah keberpihakan diuji. Sinergi menyoroti bagaimana kebijakan yang tepat bisa menjadi alat keadilan sosial—atau sebaliknya, menjadi jarak baru antara negara dan warganya.

Di atas semua itu, edisi ini juga mengajak pembaca merenung lebih jauh: tentang gagasan negarawan dan kematangan elite menuju demokrasi yang berkualitas. Tulisan KMS PKS menegaskan bahwa demokrasi tak cukup hanya prosedural. Ia menuntut kedewasaan, etika, dan kemampuan menahan diri—terutama dari mereka yang memegang kuasa.

Akhirnya, Sinergi Edisi 03 kami persembahkan sebagai ruang temu antara kerja nyata, kebijakan yang berpihak, dan cita-cita kenegarawanan. Karena bangsa ini tidak kekurangan slogan—yang kita butuhkan adalah konsistensi, kepedulian, dan kepemimpinan yang matang.

Kata Pengantar

Ketua BP3U DPP PKS) **Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.**

Di tengah dinamika bangsa yang terus bergerak, kebijakan publik dan anggaran negara kembali diuji pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana ia benar-benar berpihak kepada rakyat. Bukan pada jargon, bukan pada tabel angka, tetapi pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat—terutama mereka yang paling rentan menghadapi tekanan ekonomi, bencana alam, dan ketidakpastian hidup. Majalah Sinergi Edisi 03 hadir untuk menempatkan pertanyaan itu di pusat diskursus.

Kebijakan publik sejatinya adalah ekspresi keberpihakan. Ia mencerminkan nilai, visi, dan keberanian moral para pengambil keputusan. Anggaran, pada saat yang sama, adalah instrumen paling konkret dari politik keberpihakan tersebut. Ketika anggaran disusun tanpa empati sosial, ia menjadi sekadar dokumen administratif. Namun ketika dirancang dengan perspektif keadilan, anggaran menjelma menjadi alat pemulihan, perlindungan, dan pemberdayaan rakyat.

Dalam konteks bencana alam yang berulang melanda berbagai wilayah Indonesia, keberpihakan anggaran menjadi semakin relevan. Tidak cukup hadir saat darurat, negara dituntut konsisten dalam fase pemulihan dan pembangunan kembali.



Di sinilah peran pejabat publik dan struktur pemerintahan diuji: apakah kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga, atau berhenti pada kepatuhan prosedural semata.

Melalui edisi ini, Sinergi mengajak pembaca—khususnya para pejabat publik dan pemangku kebijakan—untuk melihat anggaran sebagai amanah. Amanah yang harus dijaga dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberanian memilih prioritas. Kebijakan pro-rakyat bukan berarti populis tanpa perhitungan, melainkan kebijakan yang

Di tengah dinamika bangsa yang terus bergerak, kebijakan publik dan anggaran negara kembali diuji pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana ia benar-benar berpihak kepada rakyat. Bukan pada jargon, bukan pada tabel angka, tetapi pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat

berpijak pada data, kepekaan sosial, dan visi jangka panjang.

Kami juga menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kematangan elite politik. Demokrasi yang berkualitas tidak lahir dari hiruk-pikuk kompetisi semata, tetapi dari kemampuan para pemimpin untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sesaat. Gagasan kenegarawanan yang dihadirkan dalam edisi ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan membutuhkan kedewasaan, bukan sekadar legitimasi elektoral.

Akhir kata, Majalah Sinergi Edisi 03 diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus rujukan praktis. Bahwa kerja-kerja kebijakan dan penganggaran yang pro-rakyat bukan pilihan tambahan, melainkan keharusan moral dan konstitusional. Semoga ikhtiar kecil ini dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk menghadirkan kebijakan publik yang adil, berpihak, dan berkelanjutan.



1

Menakar Akar Demokrasi dan Kematangan Elite





KETUA MAJELIS SYURA PKS **Mohamad Sohibul Iman, Ph. D**

Kekuatan Ideologi Menuju Demokrasi yang Berkualitas

Pendahuluan

Teringat kisah indahnya persahabatan para tokoh bangsa yang diceritakan dengan sangat apik oleh Tempo dalam buku "Natsir Politik Santun Di Antara Dua Rezim." Mohamad Natsir sebagai tokoh partai Islam Masyumi ketika itu dengan Ignatius Joseph Kasimo, tokoh partai Katolik Indonesia.

Keduanya sering terlihat berdebat sangat tajam dalam sidang-sidang Konstituante, tapi ketika pulang mereka sering berboncengan dan minum kopi bersama tanpa ada perasaan dendam di antara keduanya.

Tidak hanya dengan Kasimo, Natsir juga bersahabat dekat dengan Johannes Leimena yang merupakan tokoh Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan bahkan dengan Dipa



Nusantara Aidit yang merupakan Ketua CC PKI.

Kerasnya pertarungan politik dan perbedaan tajam ideologi di antara mereka ketika itu, tetap disikapi dengan cara santun dan penuh persahabatan, karena masing-masing pihak saling memahami, muaranya bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Periode waktu 1950-1955 merupakan fase penting dan krusial dalam sejarah demokrasi Indonesia karena merupakan masa transisi dari negara serikat (RIS) ke negara kesatuan (NKRI). Lahirnya banyak partai politik, sistem parlementer, menunjukkan dinamika pembentukan sistem demokrasi modern meski penuh ketidakstabilan politik. Eksperimen demokrasi ini menjadi fondasi kebangsaan yang kuat dalam pembentukan negara demokrasi Indonesia

Perjalanan sejarah dalam pembentukan negara demokrasi pasca kemerdekaan, tidak bisa dilepaskan dari figur-figur kunci, para elite politik ketika itu. Kematangan berpolitik, memiliki pemahaman ideologi politik yang kuat serta kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan mereka memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi politik secara efektif, berintegritas, dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Puncaknya adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 yang berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis dalam sejarah Indonesia modern. Hal ini tercermin dari partisipasi dan antusias masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang aman dan tertib meskipun dengan sarana yang sangat sederhana, serta kesadaran berkompetisi yang sehat di antara partai politik, termasuk para politisi yang mencalonkan diri.

"Elite politik yang punya kekuatan pemikiran dan matang secara ideologi akan melahirkan ide dan politik gagasan untuk membangun bangsa dengan semangat kenegarawanan. Begitupula demokrasi yang berlandaskan ideologi akan melahirkan persatuan dan kematangan politik, bukan perpecahan atau politik adu domba."

Pemilu pertama ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Keberhasilan pemilu tahun 1955 akan selalu menjadi daya tarik untuk dikaji dan dibahas dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Tercatat Herbert Feith dalam bukunya, "The Indonesian Election of 1955", akademisi asal Australia ini memotret pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia tersebut. Dikatakan Feith, petugas partai di masing-masing TPS banyak yang buta huruf. Namun, di antara para buta huruf hampir selalu ada paling tidak dua orang yang bisa membaca. Keterbatasan ini tidak menghalangi setiap orang untuk menjaga dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu pertama tersebut.

Selain tingkat pendidikan yang masih rendah, Pemilu tahun 1955 juga berada dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Sebagai negara yang baru merdeka masih mencari bentuk, kondisi perekonomian cenderung tidak stabil, ditandai inflasi tinggi, mata uang yang bergejolak, angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, defisit anggaran yang membengkak serta utang pemerintah yang cukup besar.

Semuanya tidak menjadi penghambat dalam menghasilkan pemilu yang berkuaitas dan bermartabat.

Kematangan Elite

Pemilu tahun 1955 bukan sekadar proses memilih wakil rakyat, tetapi juga menandai lahirnya budaya politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilu ini menjadi simbol kebangkitan politik rakyat setelah kemerdekaan, sekaligus wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan ekonomi masyarakat, tidak menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemilu yang berkualitas, menghasilkan anggota konstituante dan DPR yang merepresentasikan pilihan rakyat.

Pemilu pertama tersebut juga memberikan pelajaran penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Kedewasaan elite politik dalam menampilkan sosok yang memiliki karakter ideologis yang kuat, berintegritas dan bersahaja adalah faktor kunci yang menjadi daya tarik bagi keberhasilan pemilu pertama tersebut.

Terbukti, partisipasi masyarakat dalam memilih anggota DPR dan konstituante mencapai 37,78 juta atau 87,65 persen dari 43,10 juta pemilih terdaftar. Bandingkan dengan pemilu tahun 2024 dimana tingkat partisipasi aktifnya sekitar 81,9 persen.

Adanya hipotesis yang mengatakan bahwa demokrasi yang berkualitas akan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pendapatan

> Mungkin tidak ada yang tahu, apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Natsir dan Pak Kasimo saat minum kopi bersama, tetapi kita tahu apa yang telah beliau perjuangkan untuk bangsa dan negara."

(ekonomi) masyarakat. Tetapi hal ini terbantahkan oleh pemilu tahun 1955. Kematangan atau kedewasaan elite politik adalah faktor inti (core factor) dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Sementara itu, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat lebih berfungsi sebagai faktor pendukung (enabling factor).

Meskipun pendidikan dan ekonomi sangat penting dalam membangun masyarakat yang terdidik dan berdaya, tetapi kematangan moral dan etika para elite politik tetap menjadi faktor penentu lahirnya proses demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Dalam praktiknya seringkali politisi yang tidak matang (childish) akan memanfaatkan kebodohan dan kemiskinan konstituen untuk kepentingan kekuasaan, tetapi politisi yang matang dan dewasa akan memanfaatkan kekuasaan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan konstituennya.

Selain itu, kedewasaan para elite juga sangat membantu dalam menghargai proses politik yang sedang berlangsung. Mereka menjadikan pemilu sebagai kontestasi ide dan gagasan untuk merebut hati masyarakat, ketimbang menggunakan isu SARA untuk menyerang lawan politik dan menggunakan politik transaksional (money politic) untuk membeli suara masyarakat.

Menghormati konstitusi, bahkan ketika regulasi tidak berpihak sekalipun, mereka tidak berusaha mengubah aturan main demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Begitupula ketika memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, para elit ini memilih jalan lurus untuk menjalankan kekuasaanya, tidak melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of power) dengan membiarkan perilaku koruptif dan manipulatif. Elite yang matang dan dewasa akan memprioritaskan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat di atas ambisi politik jangka pendek atau keuntungan materi yang mereka dapatkan.

Kekuatan Ideologi dan Politik Gagasan

Kematangan elite politik tidak lahir dari ruang hampa, tapi terbentuk dari sebuah proses panjang pergulatan ideologi. Tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, dan Natsir adalah figur yang lahir dari



pertarungan ideologi yang sangat kuat, pemikiran mereka saling bersinggungan, beradu, dan membentuk fondasi ideologis bangsa.

Mulai dari pemikiran nasionalisme, sosialisme, hingga Islamisme, tetap relevan dalam diskursus politik kekinian. Ideologi memberikan arah dan motivasi dalam perjuangan politik, sehingga seorang politisi tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi memperjuangkan nilai dan cita-cita besar.

Elite politik yang punya kekuatan pemikiran dan matang secara ideologi akan melahirkan ide dan politik gagasan untuk membangun bangsa dengan semangat kenegarawanan. Begitupula demokrasi yang berlandaskan ideologi akan melahirkan persatuan dan kematangan politik, bukan perpecahan atau politik adu domba.

Karena itu, setiap elite dan partai politiknya harus terus menjaga jati dirinya sebagai partai yang memiliki ideologi, mengedepankan politik gagasan dan berkomitmen menghadirkan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Perjalanan panjang untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas tidak boleh berhenti. Para founding fathers sudah membangun fondasi yang kuat untuk diteruskan. Mungkin tidak ada yang tahu, apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Natsir dan Pak Kasimo saat minum kopi bersama, tetapi kita tahu apa yang telah beliau perjuangkan untuk bangsa dan negara.

2

Republik Yang Berjanji, Negara Yang Menghindar





KETUA DEPAHANKAM, DPP BIDANG POLHUKAM Dr. Agus Widiarto

HAM 2025: Republik yang Berjanji, Negara yang Menghindar

Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia Indonesia

Tahun 2025 seharusnya menjadi momentum pembaruan. Pemerintahan berganti, arah pembangunan dipacu, dan janji negara kembali diperdengarkan. Namun dalam urusan hak asasi manusia (HAM), jarum jam seolah enggan bergerak maju. Bahkan, pada beberapa titik, ia tampak berputar ke belakang.

Berbagai catatan lembaga pemantau HAM menunjukkan pola lama yang tak kunjung putus: kekerasan aparat yang berulang, kriminalisasi pembela HAM, penyempitan ruang sipil, diskriminasi terhadap kelompok rentan, serta penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terus menggantung. Di atas kertas, negara terlihat sibuk. Di lapangan, korban tetap menunggu.

Catatan Akhir Tahun HAM 2025 ini disusun untuk membaca ulang situasi tersebut secara jernih—tanpa retorika berlebihan, tanpa pengaburan istilah—sekaligus menawarkan arah kebijakan yang lebih berani dan berpihak pada korban.

Negara Hukum di Atas Kertas, HAM di Bawah Meja

Secara normatif, Indonesia tidak kekurangan payung hukum HAM. Konstitusi menjaminnya. Undang-undang mengaturnya. Instrumen internasional telah diratifikasi. Namun hukum, seperti yang sering kita pelajari dari sejarah, hanya sekuat kemauan politik yang menopangnya.

Sepanjang 2025, berbagai laporan memperlihatkan ketegangan yang kian nyata antara negara dan warga. Kebebasan berekspresi kembali diuji, terutama dalam pengamanan demonstrasi. Konflik agraria terus berulang dengan pola yang sama: warga berhadapan dengan aparat, dan investasi hampir selalu menjadi alasan pembenar. Masyarakat adat, aktivis lingkungan, hingga jurnalis berada

dalam posisi rawan.

Agenda HAM, sekali lagi, belum sungguh-sungguh menjadi arus utama kebijakan publik. Ia hadir dalam pidato, tetapi absen dalam keputusan.

Kementerian Baru, Pertanyaan Lama

Pemisahan Kementerian Hukum dan HAM serta pembentukan Kementerian HAM pada 2025 sempat menyalakan harapan. Secara desain, fokus HAM tak lagi "menumpang" urusan administrasi hukum. Koordinasi lintas sektor seharusnya lebih kuat. Sinergi dengan lembaga independen seperti Komnas HAM mestinya lebih strategis.

Namun pertanyaan mendasarnya tak bisa dihindari: apakah kementerian ini hadir sebagai motor etik konstitusi, atau sekadar ornamen politik? Sejauh mana ia berani bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah sendiri? Dan yang paling krusial, apakah independensi lembaga-lembaga HAM benar-benar dijaga?

Tantangan 2025 bukan sekadar membangun institusi baru, melainkan memastikan HAM tidak terjebak menjadi proyek birokrasi—rapi di struktur, kosong di substansi.

Tahun yang Keras bagi Warga

Situasi HAM sepanjang 2025 menunjukkan beberapa kecenderungan yang konsisten dan mengkhawatirkan. Kekerasan aparat masih muncul dalam



pembahasan kebijakan publik dan anggaran pro-rakyat menjadi poros penting. Anggaran bukan angka dingin di meja rapat; ia adalah sikap politik. Ke mana uang negara diarahkan, di situlah keberpihakan diuji

pengamanan demonstrasi. Kriminalisasi terhadap pembela HAM, aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan jurnalis terus berlangsung. Prinsip fair trial kerap diabaikan melalui penangkapan sewenang-wenang dan penggunaan pasal-pasal karet.

Diskriminasi terhadap kelompok rentan—perempuan, minoritas seksual, dan kelompok kepercayaan—masih menjadi realitas sehari-hari. Sementara itu, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tetap berjalan di tempat, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial.

Kesenjangan antara komitmen normatif dan praktik lapangan kian menganga.

Pembela HAM: Sendirian di Tengah Tekanan

Sepanjang 2025, pembela HAM menghadapi tekanan berlapis: pelaporan pidana, pembubaran kegiatan, hingga kekerasan fisik. Banyak di antaranya terkait advokasi lingkungan, penolakan proyek strategis nasional, dan pembelaan hak masyarakat adat.

Negara, sejauh ini, belum menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif dan mengikat. Pendampingan hukum oleh organisasi masyarakat sipil dan pengaduan ke Komnas HAM masih menjadi tumpuan utama. Fakta ini berbicara jujur: negara belum sepenuhnya berdiri di sisi mereka yang mempertahankan hak warga.

Demonstrasi dan Tameng Kekuasaan

Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam pengamanan demonstrasi kembali tercatat sepanjang 2025. Polanya nyaris seragam dengan tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan secara internal, melalui mekanisme etik, dan jarang berujung pada akuntabilitas pidana.

Pendekatan seperti ini terbukti tidak efektif. Ia gagal mencegah pengulangan dan secara perlahan menormalisasi kekerasan sebagai "risiko tugas".

Tanah, Buruh, dan Negara yang Salah Posisi

Konflik agraria dan pelanggaran hak-hak buruh tetap mendominasi pengaduan HAM. Perampasan tanah, kriminalisasi petani, hingga pembungkaman serikat buruh menunjukkan kecenderungan negara memosisikan diri sebagai



pelindung investasi, bukan pelindung warga.

Di sinilah persoalan HAM menjadi struktural: bukan soal satu-dua aparat, melainkan arah kebijakan.

KM 50: Luka yang Dibiarkan Terbuka

Kasus tewasnya enam anggota Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta–Cikampek pada 2019 adalah ujian serius hak hidup. Komnas HAM menyimpulkan adanya unlawful killing terhadap empat korban. Namun hingga 2025, perkara ini berhenti pada peradilan pidana biasa dengan putusan bebas bagi aparat terdakwa.

STemuan Komnas HAM tak ditindaklanjuti secara memadai. Mekanisme pengadilan HAM tak pernah benar-benar ditempuh. Korban dan keluarganya tidak memperoleh pemulihan yang layak. KM 50 kini berdiri sebagai simbol impunitas—sunyi, tapi berbicara keras tentang kegagalan negara.

Tantangan 2025 bukan sekadar membangun institusi baru, melainkan memastikan HAM tidak terjebak menjadi proyek birokrasi—rapi di struktur, kosong di substansi

Bawaslu 2019: Kekerasan yang Tak Pernah Ditutup

Kekerasan dalam aksi 21–22 Mei 2019 di depan Bawaslu RI menimbulkan korban jiwa dan pelanggaran serius kebebasan berekspresi. Komnas HAM menemukan pelanggaran HAM. Namun hingga 2025, tak ada penyelesaian komprehensif.

Tak ada pertanggungjawaban komando. Rekomendasi diabaikan. Jaminan ketidakberulangan nihil. Pola represi kebebasan sipil pun terus berulang, seolah negara lupa—atau memilih lupa.

Masalah Besar yang Terus Dipelihara

Dari berbagai kasus tersebut, terlihat masalah struktural yang konsisten: impunitas aparat, lemahnya daya paksa Komnas HAM, dominasi pendekatan keamanan, minimnya pemulihan korban, dan absennya jaminan ketidakberulangan.

Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini kegagalan arah.

Jalan Keluar yang Tak Bisa Ditunda

Penguatan akuntabilitas aparat menjadi syarat mutlak, melalui proses hukum yang independen dan pengawasan sipil yang efektif. Penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menindaklanjuti temuan Komnas HAM melalui mekanisme yudisial, disertai pemulihan korban secara menyeluruh.

Pengamanan unjuk rasa perlu direformasi dengan SOP berbasis standar HAM internasional, termasuk larangan penggunaan kekuatan berlebihan. Negara juga harus segera menyusun regulasi perlindungan pembela HAM dan menghapus kebijakan diskriminatif terhadap kelompok rentan.

HAM atau Retorika Kekuasaan

Catatan Akhir Tahun HAM 2025 menunjukkan satu kesimpulan pahit: tanpa keberanian politik untuk menyelesaikan kasus-kasus simbolik seperti KM 50 dan kekerasan Bawaslu 2019, agenda HAM akan terus kehilangan legitimasi.

HAM tidak butuh janji baru. Ia butuh keputusan yang berpihak. Dan sejarah selalu mencatat: negara dinilai bukan dari pidatonya, melainkan dari cara ia memperlakukan warganya yang paling rentan

3

Politik Anggaran dan Arah Kebijakan Pro-rakyat



APBD dan Nasib Rakyat: Membaca Anggaran Daerah

Antara Janji Kesejahteraan dan Kenyamanan Birokrasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering diperlakukan sebagai dokumen teknokratis—tebal, penuh angka, dan jauh dari jangkauan publik. Padahal, di balik tabel dan persentase itu, tersimpan pertarungan nilai yang paling telanjang: apakah uang publik benar-benar bekerja untuk rakyat, atau justru habis untuk menopang kenyamanan birokrasi.

Di era desentralisasi, daerah memiliki kewenangan luas mengelola keuangannya. Namun kewenangan itu datang bersama dua risiko klasik: inefisiensi struktural dan kebocoran anggaran. Di titik inilah pertanyaan mendasarnya muncul—apa ukuran "anggaran pro-rakyat" dan bagaimana publik bisa menilainya secara sederhana namun presisi?

Anggaran Bukan Angka, tapi Sikap Politik

Sebelum berbicara tentang rasio dan persentase, penting memahami satu hal: anggaran bukan sekadar dokumen keuangan. Ia adalah pernyataan politik tentang siapa yang diprioritaskan dan siapa yang dikorbankan.

Ukuran keberpihakannya sederhana: seberapa besar belanja diarahkan untuk pemenuhan hak dasar—pendidikan, kesehatan, perumahan— dibandingkan untuk belanja rutin aparatur. Anggaran pro-rakyat bukan jargon normatif, melainkan struktur matematis yang bisa diuji."

Dalam pendekatan **Pro-Poor Budgeting**, anggaran dirancang secara sengaja untuk memihak kelompok miskin dan rentan. Keberpihakan ini tidak lahir dari retorika, melainkan dari dua prasyarat mendasar. Pertama, data kemiskinan yang akurat dan multidimensi. Tanpa itu, program apa pun berisiko salah sasaran. Kedua, partisipasi publik yang substantif—bukan formalitas—dalam proses perencanaan anggaran.

Di sinilah konsep kedaulatan anggaran menemukan relevansinya. Anggaran dipahami sebagai hak rakyat, bukan milik elite birokrasi. Ukuran keberpihakannya sederhana: seberapa besar belanja diarahkan untuk pemenuhan hak dasar—pendidikan, kesehatan, perumahan—dibandingkan untuk belanja rutin aparatur. Gagasan ini lama diperjuangkan oleh organisasi masyarakat sipil seperti *Seknas FITRA*, yang menempatkan transparansi anggaran sebagai instrumen perjuangan hak-hak sosial warga.

Masalahnya, struktur birokrasi yang gemuk dan politik lokal yang rapuh kerap membajak logika anggaran. Akibatnya, belanja publik terdesak, sementara belanja internal terus membengkak.

Membedah APBD: Pertarungan Rutin dan Investasi*

Cara paling mudah membaca keberpihakan APBD adalah dengan melihat komposisi belanjanya. Di sinilah wajah asli kebijakan fiskal daerah



tampak jelas.

Belanja operasi—yang mencakup gaji aparatur dan belanja barang-jasa—adalah indikator dominasi birokrasi. Ketika pos ini melampaui 60 persen total APBD, sinyalnya terang: pemerintah daerah lebih sibuk mengurus dirinya sendiri ketimbang membangun layanan publik.

Sebaliknya, belanja modal mencerminkan investasi nyata untuk rakyat. Jalan, sekolah, irigasi, fasilitas kesehatan—semua lahir dari pos ini. Dalam teori efisiensi anggaran, rasio belanja modal yang sehat berada di kisaran 25–30 persen atau lebih. Semakin besar angkanya, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan publik.

Negara sebenarnya telah menetapkan pagar pembatas melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Belanja pegawai ditekan maksimal 30 persen, sementara belanja infrastruktur pelayanan publik didorong minimal 40 persen dalam jangka menengah. Aturan ini bukan teknis belaka, melainkan upaya memaksa perubahan orientasi: dari birokrasi ke warga.

Ketika Efisiensi Menjadi Keputusan Politik*

Efisiensi anggaran sering dipersepsikan sebagai soal teknis administrasi. Padahal, ia adalah keputusan politik yang paling tidak populer: memotong kenyamanan internal demi memperluas ruang fiskal bagi publik.

Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa penghematan belanja rutin dapat langsung diterjemahkan menjadi penguatan layanan dasar. Intinya bukan pada besarnya anggaran, melainkan pada keberanian menggeser prioritas. Efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi strategi merebut kembali anggaran dari pos-pos yang tidak produktif.

Daerah dengan kemandirian fiskal yang baik bahkan mampu mengarahkan pendapatan asli daerah langsung ke pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, bukan hanya membangun infrastruktur umum yang abstrak manfaatnya. Dalam kerangka Pro-Poor Budgeting, ini menandai pergeseran penting: dari subsidi institusi ke subsidi individu, dari simbol pembangunan ke dampak nyata.

Anggaran Besar, Bocor Lebih Besar*

Namun anggaran yang tampak "pro-rakyat" di atas kertas belum tentu bersih di lapangan. Korupsi pengadaan barang dan jasa tetap menjadi penyakit kronis. Modusnya beragam, dari perusahaan cangkang hingga laporan pekerjaan fiktif. Yang paling berbahaya, kebocoran ini sering dilegalkan melalui prosedur administratif yang tampak sah.

Dampaknya selalu sama: kualitas proyek menurun, umur layanan pendek, dan rakyat menanggung kerugian jangka panjang. Dalam konteks ini,



transparansi bukan slogan moral, melainkan mekanisme pencegahan paling efektif. Proyek tanpa papan informasi, pekerjaan yang cepat rusak, dan laporan yang tak sebanding dengan kondisi lapangan adalah alarm dini yang bisa dikenali warga biasa.

Membaca Anggaran, Merebut Kedaulatan*

Kesimpulannya tegas: anggaran pro-rakyat bukan jargon normatif, melainkan struktur matematis yang bisa diuji. Rasio belanja pegawai yang terkendali dan belanja modal yang dominan adalah indikator awalnya. Namun lebih dari itu, keberpihakan anggaran ditentukan oleh validitas data kemiskinan, partisipasi publik, dan keberanian politik memangkas belanja nyaman.

Di titik inilah literasi anggaran menjadi senjata warga. Membaca ringkasan APBD, mengamati pola tender, dan mendokumentasikan proyek bermasalah bukan tindakan teknis semata, melainkan praktik kewargaan. Ketika warga memahami anggaran, ruang pembajakan menyempit.

Pada akhirnya, APBD adalah cermin relasi kuasa di daerah. la bisa menjadi alat emansipasi, atau justru monumen kemapanan birokrasi. Pilihannya tidak pernah netral. Dan seperti semua dokumen politik, anggaran selalu bicara jujur—asal kita mau membacanya.

Tim Redaksi Sinergi



Siapa yang Sebenarnya Dilayani Negara?

Menyigi Kebijakan Publik Pro-Rakyat di Antara Data, Politik, dan Partisipasi

Istilah "kebijakan pro-rakyat" terdengar akrab di telinga publik Indonesia. Ia diulang di mimbar kampanye, ditulis di dokumen perencanaan, dan dijadikan mantra legitimasi oleh para pengambil keputusan. Namun di balik popularitas istilah itu, satu pertanyaan mendasar sering luput diajukan: bagaimana sebenarnya kebijakan yang memihak rakyat itu dilahirkan, dan dengan ukuran apa keberpihakannya bisa dibuktikan?

Dalam praktiknya, banyak kebijakan lahir dengan niat baik, tetapi gagal

Masalahnya bukan pada ketiadaan niat, melainkan pada cara negara merancang kebijakan—apakah berbasis intuisi kekuasaan atau bertumpu pada data, partisipasi, dan bukti ilmiah.

menjawab persoalan riil masyarakat. Bantuan sosial salah sasaran, program pembangunan tak menyentuh kelompok rentan, atau regulasi yang justru menambah beban warga. Masalahnya bukan pada ketiadaan niat, melainkan pada cara negara merancang kebijakan—apakah berbasis intuisi kekuasaan atau bertumpu pada data, partisipasi, dan bukti ilmiah.

Dari Slogan Politik ke Ukuran Ilmiah

Pasca-reformasi, Indonesia memasuki fase transisi demokrasi yang kompleks. Di satu sisi, ruang partisipasi publik terbuka lebar. Di sisi lain, birokrasi dan proses legislasi kerap berjalan dengan logika lama: elitis, tertutup, dan reaktif. Dalam situasi ini, istilah "pro-rakyat" kerap menjadi jargon elastis—mudah diucapkan, sulit diverifikasi.

Riset ini menunjukkan bahwa paradigma kebijakan publik Indonesia sedang bergeser. Perlahan, tetapi nyata. Negara mulai meninggalkan pendekatan berbasis otoritas menuju kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan partisipasi bermakna. Pergeseran ini tidak terjadi begitu saja. Ia dipicu oleh tekanan publik, koreksi yudisial, serta kesadaran bahwa kompleksitas masalah sosial tak bisa diselesaikan dengan pendekatan coba-coba.

Kebijakan yang benar-benar memihak rakyat, dalam kerangka ini, bukan lagi soal retorika keberpihakan, melainkan soal validitas proses dan dampak.

Amanat Konstitusi dan Batas Kekuasaan

Secara filosofis, seluruh kebijakan publik di Indonesia berakar pada amanat konstitusi: memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini bukan sekadar kalimat pembuka Undang-Undang Dasar, melainkan batas etis dan politik bagi setiap kebijakan negara.

Artinya, kebijakan apa pun—baik di tingkat pusat maupun daerah—harus bisa diuji secara konstitusional: apakah ia melindungi hak dasar warga negara, atau justru menggerusnya. Di sinilah keberpihakan pertama diuji. Kebijakan yang melanggar hak dasar, sekalipun diklaim "demi kepentingan umum", sejak

awal telah kehilangan legitimasi pro-rakyatnya.

Naskah Akademik: Ilmu Pengetahuan di Meja Legislasi

Dalam sistem legislasi Indonesia, Naskah Akademik dirancang sebagai pagar ilmiah. Ia menjadi fondasi rasional bagi setiap rancangan undang-undang, memastikan bahwa kebijakan tidak lahir dari kehendak sesaat, tetapi dari kajian mendalam.

Idealnya, Naskah Akademik menjawab tiga pertanyaan besar: nilai apa yang ingin dijaga, masalah sosial apa yang hendak diatasi, dan bagaimana kebijakan itu selaras dengan sistem hukum yang ada. Namun riset ini juga mencatat sisi gelapnya. Dalam praktik politik, Naskah Akademik kerap direduksi menjadi dokumen pelengkap—disusun belakangan untuk membenarkan pasal-pasal yang sudah disepakati secara politis.

Ketika ilmu pengetahuan hanya menjadi stempel, kebijakan kehilangan basis objektifnya. Di titik inilah klaim pro-rakyat mulai rapuh sejak lahir.

Senayan dan Seni Kompromi

Setelah melewati fase teknokratis, kebijakan masuk ke arena politik. Di



> Kebijakan pro-rakyat bukanlah hasil dari niat baik semata. Ia lahir dari pertemuan antara data yang presisi, proses yang inklusif, dan evaluasi yang

DPR, substansi kebijakan diuji oleh kepentingan, lobi, dan kompromi. Proses ini tidak selalu buruk—politik, pada dasarnya, adalah ruang negosiasi. Namun ia menjadi bermasalah ketika kompromi menggerus substansi keberpihakan.

Sebuah rancangan kebijakan yang awalnya dirancang untuk melindungi kelompok rentan bisa berubah arah akibat tarik-menarik kepentingan. Sebaliknya, tekanan publik dan representasi politik yang kuat juga bisa memperbaiki kebijakan yang semula kering dan birokratis. Di sinilah kualitas demokrasi bekerja: apakah politik menjadi alat koreksi, atau justru alat distorsi.

Ketika Rakyat Harus Didengar, Bukan Sekadar Dihadirkan

Salah satu titik balik penting dalam sejarah kebijakan publik Indonesia adalah koreksi yudisial terhadap proses legislasi yang menutup partisipasi publik. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan standar baru: partisipasi publik harus bermakna.

Partisipasi tidak lagi cukup dimaknai sebagai sosialisasi satu arah. Negara wajib membuka ruang dialog, mempertimbangkan masukan publik secara serius, dan menjelaskan alasan ketika aspirasi tidak diakomodasi. Sejak itu, validitas kebijakan tidak hanya diuji dari isinya, tetapi juga dari cara ia dilahirkan.

Musrenbang dan Pertaruhan di Akar Rumput

Di tingkat perencanaan pembangunan, Musrenbang menjadi simbol partisipasi bottom-up. Ia dirancang sebagai ruang dialog antara negara dan warga. Namun riset ini mencatat paradoks: kehadiran belum tentu berarti pengaruh.

Banyak warga hadir tanpa bekal literasi anggaran. Usulan menguap di tengah jalan. Prioritas elite sering mengalahkan kebutuhan akar rumput. Meski demikian, inovasi di sejumlah daerah menunjukkan bahwa partisipasi bisa dibuat lebih adil dan afirmatif jika ada kemauan politik untuk mendesainnya secara inklusif.

Negara Belajar Membaca Data

Salah satu lompatan besar kebijakan publik Indonesia adalah upaya merapikan data. Melalui kebijakan Satu Data Indonesia dan Regsosek, negara berusaha keluar dari kekacauan statistik yang selama ini membuat kebijakan salah sasaran.

Dengan data sosial ekonomi yang presisi hingga tingkat rumah tangga, kebijakan tidak lagi bergantung pada asumsi makro. Kemiskinan dipahami secara multidimensi, intervensi dirancang terpadu, dan dampak bisa diukur lebih cepat. Di sinilah kebijakan mulai berbicara dengan bahasa realitas, bukan persepsi.

Menghitung Dampak Sebelum Menyuruh Rakyat Menanggung

89Pendekatan baru juga tampak dalam penggunaan Regulatory Impact Analysis dan Cost-Benefit Analysis. Negara mulai belajar menghitung konsekuensi kebijakan sebelum menetapkannya. Pertanyaan sederhana tetapi krusial diajukan: apakah manfaat sosialnya lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung masyarakat?
Kebijakan yang lolos uji dampak bukan jaminan kesempurnaan, tetapi ia memperkecil risiko kegagalan sistemik.

Ukuran Baru Keberpihakan

Keberpihakan kini memiliki indikator yang relatif jelas. Di level makro, ia tercermin dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang menilai apakah pertumbuhan benar-benar menurunkan ketimpangan dan kemiskinan. Di level pelayanan dasar, ia diuji melalui Standar Pelayanan Minimal—hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara. Di level persepsi publik, ia tercermin dalam kepuasan warga terhadap layanan negara.
Kebijakan yang gagal memenuhi indikator-indikator ini, betapapun indah narasinya, sulit disebut pro-rakyat.

Belajar dari Praktik Nyata

Sejumlah kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data, partisipasi, dan evaluasi dampak bukan utopia. Program Kartu Prakerja, strategi penurunan stunting, hingga mekanisme penandaan anggaran tematik memperlihatkan bagaimana komitmen politik bisa diterjemahkan menjadi desain kebijakan yang terukur dan diawasi.

Keberhasilan kebijakan-kebijakan ini bukan pada popularitasnya, melainkan pada kesediaannya untuk diuji secara independen dan diperbaiki secara berkelanjutan.

Menuju Kebijakan yang Dewasa
Riset ini sampai pada satu kesimpulan penting: kebijakan pro-rakyat bukanlah hasil dari niat baik semata. Ia lahir dari pertemuan antara data yang presisi, proses yang inklusif, dan evaluasi yang jujur.

Masa depan kebijakan publik Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa sering istilah “pro-rakyat” diucapkan, melainkan oleh seberapa berani negara membuka diri pada koreksi—dari ilmu pengetahuan, dari suara warga, dan dari kenyataan sosial yang tak bisa dimanipulasi.

Di titik itulah negara berhenti sekadar mengklaim keberpihakan, dan mulai benar-benar melayani.

Dari Jalan Mantap hingga Akar Kehidupan

Wawancara dengan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif



Dari Infrastruktur ke Lingkungan: Kebijakan yang Saling Terhubung

Prinsip keberpihakan dan keberlanjutan itu pula yang melatarbelakangi kebijakan mengganti karangan bunga ucapan selamat dengan bibit tanaman pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga ke-195. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari cara pandang pembangunan yang utuh.

Karangan bunga selama ini kerap berakhir sebagai sampah dan menambah beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kalipancur. Dengan

menggantinya menjadi bibit tanaman, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendorong pengurangan sampah sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gerakan penghijauan. Bibit yang terkumpul kemudian didistribusikan untuk program konservasi alam dan penghijauan di berbagai wilayah, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada momen seremonial, tetapi berlanjut dalam jangka panjang.

Kebijakan ini mencerminkan satu garis pemikiran: pembangunan bukan hanya soal membangun jalan dan membuka lapangan kerja, tetapi juga menjaga lingkungan tempat pembangunan itu berlangsung. Infrastruktur yang kuat, ekonomi yang bergerak, dan alam yang terjaga dipandang sebagai satu kesatuan.

Dengan pendekatan yang tenang dan terukur, Fahmi Muhammad Hanif menempatkan kepemimpinan sebagai kerja berkelanjutan—bukan sekadar menghasilkan capaian cepat, tetapi meninggalkan fondasi yang bisa dirawat dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya.

Wawancara: Prioritas Pembangunan, Keberpihakan Anggaran, dan Warisan Kepemimpinan

Di tengah tuntutan pembangunan yang kian kompleks, Fahmi Muhammad Hanif memilih fokus yang jelas dan membumi. Baginya, pembangunan daerah tidak boleh terjebak pada agenda simbolik atau rutinitas birokrasi, melainkan harus benar-benar terasa dampaknya oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah.

Pendekatan inilah yang menjadi benang merah berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga saat ini—dari pembenahan jalan hingga kebijakan lingkungan yang sederhana namun berjangka panjang. Berikut petikan wawancara yang merekam arah, cara pandang, dan nilai yang ingin ia tinggalkan.

Kebijakan mengganti karangan bunga ucapan selamat dengan bibit tanaman... mencerminkan satu garis pemikiran: pembangunan bukan hanya soal membangun jalan dan membuka lapangan kerja, tetapi juga menjaga lingkungan tempat pembangunan itu berlangsung



Sinergi: Apa prioritas paling krusial yang sedang Bapak perjuangkan saat ini agar pembangunan benar-benar dirasakan rakyat kecil?

Fahmi Muhammad Hanif: Prioritas paling utama adalah memastikan infrastruktur jalan berada dalam kondisi mantap. Jalan adalah pondasi utama pertumbuhan ekonomi. Ketika akses baik, aktivitas masyarakat lancar, distribusi barang dan jasa lebih efisien, dan pada akhirnya kesejahteraan meningkat.

Prioritas kedua adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Ini berdampak langsung pada ekonomi

> “Fokusnya adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah... penganggaran harus selektif, berani memangkas yang kurang prioritas.”

keluarga, stabilitas sosial, dan rasa aman masyarakat. Dua hal ini saling terkait dan harus berjalan beriringan.

Sinergi: Di tengah keterbatasan anggaran daerah, bagaimana memastikan APBD tidak sekadar habis untuk rutinitas birokrasi?

Fahmi Muhammad Hanif: Kami berupaya agar setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata. Fokusnya adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah. Artinya, penganggaran harus selektif, berani memangkas yang kurang prioritas, dan mengarahkan sumber daya pada sektor yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sinergi: Apa tantangan terbesar dalam membenahi pelayanan publik di Purbalingga?

Fahmi Muhammad Hanif: Tantangan terbesarnya adalah memastikan komitmen anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat. Kesadaran itu terus kami bangun. Salah satu perubahan konkret yang sudah mulai dirasakan warga adalah peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan, karena kerusakan jalan berdampak pada hampir semua aktivitas masyarakat—ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

Sinergi: Dalam menghadapi krisis—baik ekonomi, sosial, maupun kebencanaan—apa pelajaran kepemimpinan paling penting yang Bapak alami?

Fahmi Muhammad Hanif: Pelajaran terpenting adalah pentingnya kepemimpinan yang kolaboratif. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Ketika pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan bergerak bersama, penanganan krisis menjadi lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih berkelanjutan.

Sinergi: Jika masa jabatan ini diringkas menjadi satu warisan utama, apa nilai yang ingin Bapak tinggalkan?

Fahmi Muhammad Hanif: Ada tiga nilai: komitmen, kolaborasi, dan integritas. Dengan komitmen yang kuat, kerja bersama semua pihak, serta integritas dalam melayani masyarakat, saya percaya Purbalingga bisa tumbuh menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera.



Profil Singkat:

Fahmi
Muhammad Hanif

Sebagai Bupati, Fahmi membawa semangat pembaruan dan gaya kepemimpinan yang pragmatis— berfokus pada pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,

Fahmi Muhammad Hanif adalah seorang pemimpin muda dari generasi milenial yang tengah memimpin Purbalingga sebagai Bupati untuk periode 2025–2030, setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.

Lahir di Tangerang pada 2 September 1996, Fahmi merupakan figur yang relatif muda dibandingkan dengan para kepala daerah lain di Indonesia. Ia tumbuh di lingkungan yang dekat dengan dunia politik dan pemerintahan sejak dini—sebagai putra dari Rofik Hananto, anggota DPR RI—yang menanamkan nilai-nilai integritas dan pelayanan publik sejak awal kehidupannya.

Fahmi menempuh pendidikan formal di beberapa lembaga, meliputi SMAIT Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, kemudian studi Teknik Mesin di Universitas Brawijaya dan Teknik Industri di Bursa Technical University, Turki. Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal sebagai pengusaha muda sukses yang mendirikan dan memimpin sejumlah perusahaan, di antaranya PT. Erdigma Indonesia serta beberapa entitas usaha lain seperti Erha Idea Cipta Karsa, Kulakin, dan Herbatech, serta menjabat sebagai Direktur di Erhanesia Group.

Sebagai Bupati, Fahmi membawa semangat pembaruan dan gaya kepemimpinan yang pragmatis—berfokus pada pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, merangkul kolaborasi lintas sektor, serta mengambil arah kebijakan yang berdampak jangka panjang.

Riza Falepi dan Warisan Kepemimpinan yang Dikenang Payakumbuh

Teknokrasi, Kreativitas, dan Integritas dalam Dua Periode Pemerintahan



Ada pemimpin yang selesai ketika masa jabatannya usai. Ada pula yang justru baru benar-benar hadir setelah ia turun dari kursi kekuasaan. Di Payakumbuh, ingatan warga tentang Riza Falepi masih hidup—bukan sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai standar pembanding yang jujur. Bandingannya sederhana tapi tajam: mana yang benar-benar bekerja, dan mana yang sekadar terlihat bekerja.

Bagi Riza Falepi, teknokrasi bukan bahasa seminar... Ia dibumikan. Urusan e-KTP dipangkas menjadi hitungan menit, perizinan diselesaikan dalam jam. Mall Pelayanan Publik tidak dihadirkan sebagai etalase proyek, tetapi sebagai mesin layanan yang bekerja.

Selama dua periode kepemimpinannya, Payakumbuh dikelola dengan pendekatan yang tidak populer namun efektif: teknokratis, detail-oriented, keras pada birokrasi yang malas, dan nyaris alergi terhadap kompromi integritas. Ini bukan gaya yang ramah pencitraan. Tapi justru di situlah letak kekuatannya. Ketika seorang pemimpin memilih hasil nyata ketimbang tepuk tangan, rasa hormat publik tumbuh tanpa perlu diminta.

Teknokrasi yang Turun ke Meja Pelayanan

Bagi Riza Falepi, teknokrasi bukan bahasa seminar atau dokumen RPJMD yang tebal. Ia dibumikan. Urusan e-KTP dipangkas menjadi hitungan menit, perizinan diselesaikan dalam jam. Mall Pelayanan Publik tidak dihadirkan sebagai etalase proyek, tetapi sebagai mesin layanan yang bekerja.

Capaian itu berbuah pengakuan nasional—diraih tanpa ongkos transaksional. Di tengah budaya birokrasi yang sering menganggap "prestasi harus diurus", sikap ini terdengar nyaris melawan arus. Namun logikanya konsisten: bila sistem dirancang benar dan dijalankan disiplin, hasil akan datang sendiri.

Kreativitas yang Hemat, Bukan Pamer

Kreativitas kepemimpinan Riza Falepi tidak tampil flamboyan. Ia hadir dalam keberanian berpikir efisien. Saat banyak daerah menghabiskan anggaran belasan miliar untuk sistem teknologi, Payakumbuh memilih jalan fungsional: biaya kecil, manfaat besar, dan bisa langsung dipakai.

Pembangunan kota dipilih bukan karena mudah dijual di media, tetapi karena relevan bagi warga. Normalisasi Batang Agam, penataan ruang publik, hingga pengelolaan kota berbasis data dijalankan dengan kalkulasi teknis yang ketat. Bahkan ketika proyek berisiko molor akibat kendala anggaran pusat, keputusan tetap diambil. Prinsipnya tegas: kepentingan warga lebih penting daripada rapor citra.

Integritas sebagai Sikap, Bukan Slogan

Integritas dalam kepemimpinan Riza Falepi diuji di wilayah paling rawan: audit, tekanan politik, konflik internal, hingga godaan personal. Pilihannya konsisten—konfrontatif bila perlu. ASN yang bermain aman di depan namun bermasalah di belakang ditegur keras. Praktik "main mata" dengan auditor ditolak secara terbuka.

Ia bahkan tak menutupi penyesalan politiknya sendiri, termasuk keputusan mengangkat figur yang ternyata tidak kompeten. Pengakuan semacam ini jarang terdengar dari kepala daerah. Namun justru di situlah publik melihat kejujuran kepemimpinan: kesalahan diakui, bukan disembunyikan.

Negara yang Hadir dalam Kehidupan Warga

Kepemimpinan Riza Falepi tidak berhenti di meja kerja. Rumah dinas sering berubah menjadi ruang aduan warga—dari konflik rumah tangga hingga kasus kekerasan domestik. Mobil dinas disiagakan, bukan untuk seremoni, melainkan untuk memastikan warga aman.

Program bedah rumah menjadi salah satu jejak paling membekas. Ribuan rumah diperbaiki, mengubah hidup keluarga yang sebelumnya tinggal di hunian tak layak. Tangis warga bukan metafora. Ia nyata. Tak mengherankan jika hingga kini, foto Riza Falepi masih terpajang di banyak kantor kelurahan—bukan karena perintah, melainkan rasa hormat.

Mengapa Riza Falepi Tetap Dikenang

Cinta warga Payakumbuh hari ini bukan lahir dari nostalgia kosong. Ia tumbuh dari pengalaman konkret: pelayanan yang cepat, pemimpin yang bisa diandalkan, dan keberanian melawan sistem yang tidak bekerja.

Menariknya, Riza Falepi justru menolak melanjutkan karier politik ke jenjang yang lebih tinggi. Alasannya sederhana dan jujur: lelah. Mengelola kota dengan serius menguras energi, pikiran, dan moral. Pernyataan ini mungkin terdengar antiklimaks, tetapi justru menegaskan satu hal penting—kepemimpinan sejati tahu kapan harus berhenti dan memberi ruang bagi generasi berikutnya.

Payakumbuh mencatat satu pelajaran berharga dari dua periode kepemimpinan ini: kota tidak membutuhkan pemimpin yang paling pandai berbicara, melainkan yang paling siap bekerja. Teknokrasi tanpa empati akan kering. Kreativitas tanpa integritas akan liar. Integritas tanpa keberanian akan mandek.

Dan ketika ketiganya bertemu, lahirlah warisan kepemimpinan—yang mungkin tidak selalu nyaman, tetapi layak dikenang.

Wawancara Khusus Reza Falepi, Walikota Payakumbuh 2012-2022.

Jalan Sunyi Kepemimpinan yang Dipilih Sadar



Di dunia politik lokal yang sering riuh oleh basa-basi dan kompromi setengah hati, Riza Falepi justru dikenal lewat jalur yang berlawanan arah. Ia tidak membangun reputasi dari retorika panjang atau pencitraan yang rajin dipoles. Namanya melekat karena satu hal yang kian langka: bekerja dengan serius, detail, dan berani menanggung risiko.

Latar belakang pendidikannya membentuk cara pandang itu. Riza Falepi adalah lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB)—sebuah konteks yang menjelaskan obsesinya pada data, sistem, dan presisi. Pendekatan teknokratis ini kemudian ia bawa ke pemerintahan Payakumbuh, kota kecil yang ia pimpin selama dua periode. Di sana, ia menemukan bahwa memimpin bukan soal terlihat paling rajin, tetapi memastikan sistem benar-benar bekerja.

Dua periode berlalu. Riza Falepi

turun dari jabatan tanpa hingar-bingar. Namun ingatan warga tak ikut turun. Hingga kini, ia masih dikenang—bukan sebagai mantan pejabat, melainkan sebagai standar kepemimpinan.

Berikut petikan wawancara mendalam dengan Riza Falepi tentang apa saja yang, menurutnya, krusial bagi seorang kepala daerah agar amanah tidak berubah menjadi beban sejarah.

Sinergi: Apa prinsip paling mendasar yang Anda pegang saat memimpin dua periode?

Riza Falepi: Kesungguhan. Kedengarannya klise, tapi justru itu yang paling langka. Kepala daerah tidak boleh setengah-setengah. Kalau fokus terbelah—sedikit mikir politik, sedikit mikir citra—hasilnya pasti biasa-biasa saja. Mengelola kota itu kerja teknis, bukan kerja sambilan.

Sinergi: Anda sering disebut terlalu teknokratis. Apakah itu pernah menjadi masalah?

Riza Falepi: Kalau teknokratis dimaknai sebagai taat data dan logika, saya tidak melihat itu sebagai masalah. Yang jadi masalah justru ketika keputusan diambil tanpa data. Banyak orang terbiasa dengan formalitas, dengan laporan yang rapi tapi kosong. Saya bertanya detail, mereka kaget. Bukan karena pertanyaannya sulit, tapi karena mereka tidak siap dengan kenyataan.

Sinergi: Pelayanan publik Payakumbuh sempat menjadi rujukan nasional. Apa kuncinya?

Riza Falepi: Sederhana: potong yang tidak perlu. Proses perizinan itu sering lama bukan karena rumit, tapi karena dibiarkan berbelit. Kalau e-KTP bisa selesai sepuluh menit, kenapa harus berhari-hari? Mall Pelayanan Publik itu bukan proyek mercusuar, tapi mesin kerja. Kalau mesinnya benar, orang tidak perlu marah-marah.

Sinergi: Anda dikenal keras pada birokrasi, bahkan konfrontatif. Mengapa?

Kalau teknokratis dimaknai sebagai taat data dan logika, saya tidak melihat itu sebagai masalah. Yang jadi masalah justru ketika keputusan diambil tanpa data. Banyak orang terbiasa dengan formalitas, dengan laporan yang rapi tapi kosong.

Riza Falepi: Karena ASN itu bukan tamu, tapi tulang punggung. Kalau tulang punggungnya bengkok, badan ikut bengkok. Ada ASN yang manis di depan, busuk di belakang. Itu harus ditegur keras. Kalau pemimpin terlalu sopan, sistem justru rusak pelan-pelan.

Sinergi: Soal integritas, Anda pernah menolak praktik-praktik "tak tertulis" yang dianggap lumrah. Tidak takut sendirian?
Riza Falepi: Takut itu pasti. Tapi lebih takut kalau amanah berubah jadi dosa. Saya tidak pernah membayar untuk penghargaan, termasuk WTP. Bahkan pernah saya minta dihentikan praktik seperti itu. Kalau dari awal kita sudah kompromi, ke depan tinggal menunggu masalah datang.

Sinergi: Keputusan politik apa yang paling Anda sesali?
Riza Falepi: Mengangkat orang yang tidak kompeten hanya karena kedekatan. Itu pelajaran mahal. Akibatnya, saya harus turun tangan mengurus hal-hal teknis yang seharusnya tidak saya kerjakan. Dari situ saya belajar: integritas tanpa kompetensi tetap berbahaya.

Sinergi: Anda juga dikenal sangat dekat dengan persoalan warga, bahkan urusan rumah tangga. Mengapa sejauh itu?
Riza Falepi: Karena warga datang bukan membawa proposal, tapi masalah hidup. Ada yang bertengkar dengan pasangan, ada yang kena KDRT. Kalau negara tidak hadir di situ, lalu hadirnya di mana? Mobil dinas saya siagakan bukan untuk gaya, tapi untuk memastikan orang aman.

Sinergi: Program bedah rumah sering disebut sebagai warisan paling emosional. Apa yang Anda rasakan saat itu?
Riza Falepi: Saya lihat sendiri orang menangis karena rumahnya berubah. Itu bukan angka di laporan. Itu hidup. Momen seperti itu mengingatkan saya bahwa jabatan hanya alat. Kalau alat itu tidak mengubah hidup orang, berarti kita gagal.

Sinergi: Mengapa Anda tidak melanjutkan karier politik ke tingkat yang lebih tinggi?
Riza Falepi: Karena lelah. Mengelola daerah dengan serius itu menguras segalanya—waktu, energi, mental. Saya tidak mau memimpin setengah hati. Lebih baik berhenti daripada melanjutkan tapi tidak fokus.

Sinergi: Apa satu pesan terpenting bagi kepala daerah hari ini?
Riza Falepi: Jangan kejar aman. Jalan aman itu sering menggoda, tapi jarang menyelesaikan masalah. Kalau ingin dicintai rakyat, jangan mulai dari ingin dicintai. Mulailah dari bekerja benar, meski itu membuat Anda tidak populer.



4

Integritas Sebagai Jalan Politik Yang Bermartabat







PKS Dorong Tata Kelola Legislatif yang Transparan dan Berkeadilan

Laporan Diskusi Nasional Integritas Legislatif PKS 2026



Integritas sebagai Jalan Politik yang Bermartabat

Di tengah meningkatnya skeptisisme publik terhadap praktik politik, isu integritas kembali menjadi kata kunci yang tak bisa ditawar. Bukan sekadar jargon, tetapi syarat dasar agar politik tetap relevan dan dipercaya. Inilah benang merah yang mengemuka dalam Diskusi Nasional Integritas Legislatif PKS 2026, sebuah forum reflektif yang digelar oleh Partai Keadilan Sejahtera

untuk menegaskan kembali arah politik bersih dan bermartabat.

Forum nasional yang berlangsung di Jakarta pada 19 Januari 2026 ini mengangkat tema "Membangun Budaya Integritas & Etika Politik Pejabat Publik PKS". Acara tersebut dihadiri pimpinan legislatif dari DPRD provinsi serta kabupaten/kota, termasuk para Ketua Fraksi PKS se-Indonesia. Diskusi ini menjadi ruang konsolidasi nilai, sekaligus peneguhan sikap di tengah tantangan tata kelola pemerintahan yang kian kompleks.



Integritas: Lebih dari Sekadar Taat Hukum

Diskusi dibuka langsung oleh Presiden DPP PKS, Almuzzamil Yusuf, yang menegaskan bahwa integritas tidak boleh direduksi sebatas kepatuhan terhadap aturan hukum. Politik yang sah secara prosedural, kata dia, belum tentu bermartabat bila mengabaikan etika dan rasa keadilan masyarakat.

Integritas, dalam pandangan PKS, adalah fondasi kepercayaan publik. Setiap kebijakan dan keputusan pejabat publik harus diuji bukan hanya dengan pasal-pasal hukum, tetapi juga dengan nurani etik dan dampaknya bagi kemaslahatan rakyat. Tanpa itu, transparansi dan akuntabilitas hanya akan menjadi slogan kosong.

Pencegahan Korupsi sebagai Kerja Sistemik

Salah satu penekanan penting dalam diskusi ini adalah pendekatan pencegahan korupsi yang bersifat sistemik. PKS menilai bahwa integritas

"Dengan menjadikan integritas sebagai identitas politik, PKS optimistis dapat terus membangun kepercayaan publik sekaligus berkontribusi nyata bagi terwujudnya pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada masa depan bangsa."



tidak bisa bergantung pada "orang baik" semata. Ia harus ditopang oleh sistem pembinaan yang berkelanjutan, tata kelola partai yang kuat, serta pemahaman hukum yang memadai bagi para pejabat publik.

Para narasumber menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kewenangan, termasuk kesadaran atas berbagai risiko dalam praktik politik dan pemerintahan. Dalam konteks ini, penguatan literasi hukum dan etika politik menjadi kebutuhan mendesak, bukan pelengkap.

Etika Publik dan Ketahanan Keluarga

Menariknya, diskusi ini tidak berhenti pada aspek struktural dan legal. PKS juga menyoroti dimensi yang kerap luput dari pembahasan politik formal: peran nilai keluarga dan etika sosial. Ketahanan keluarga dipandang sebagai fondasi moral yang berpengaruh langsung pada sikap hidup pejabat publik—mulai dari kesederhanaan, keteguhan prinsip, hingga keikhlasan dalam melayani masyarakat.

Dalam logika ini, integritas tidak lahir di ruang sidang semata, tetapi juga dibentuk di ruang-ruang privat: keluarga, lingkungan sosial, dan budaya

> Melalui Diskusi Nasional Integritas Legislatif PKS 2026, PKS menyatakan kesiapan untuk terus menjadi bagian dari solusi atas persoalan kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia

organisasi. Politik yang bersih, dengan demikian, adalah hasil dari ekosistem nilai yang dijaga secara konsisten.

Menjawab Ekspektasi Publik

Melalui Diskusi Nasional Integritas Legislatif PKS 2026, PKS menyatakan kesiapan untuk terus menjadi bagian dari solusi atas persoalan kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Komitmen tersebut diterjemahkan dalam dorongan terhadap kebijakan daerah yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada keadilan sosial.

Di tengah ekspektasi publik yang semakin tinggi, PKS menegaskan bahwa politik bersih dan bermartabat bukanlah utopia. Ia adalah kebutuhan bersama. Dengan menjadikan integritas sebagai identitas politik, PKS optimistis dapat terus membangun kepercayaan publik sekaligus berkontribusi nyata bagi terwujudnya pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada masa depan bangsa.

Pada akhirnya, diskusi ini mengirim pesan yang lugas: politik yang kehilangan integritas akan kehilangan makna. Sebaliknya, integritas yang dirawat secara sadar dan sistemik adalah jalan panjang—namun satu-satunya—menuju politik yang benar-benar melayani rakyat.



REKAM JEJAK FRAKSI PKS DALAM ISU HAM



Kasus KM 50 (Unlawful Killing)

Menginisiasi desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Secara konsisten menantang narasi kepolisian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menggunakan data pembanding dari masyarakat sipil, serta mendesak klasifikasi kasus sebagai pelanggaran HAM Berat.

Kebebasan Sipil & UU ITE

Konsisten menolak "pasal karet" dalam revisi UU ITE yang dianggap membungkam kebebasan berekspresi. Aktif melakukan pembelaan politik terhadap tokoh agama dan aktivis demokrasi yang dikriminalisasi menggunakan undang-undang tersebut

Kerusuhan Bawaslu 2019

Menjadi fraksi pertama yang mengusulkan pembentukan Pansus untuk menyelidiki korban jiwa dan menuntut transparansi data korban serta akuntabilitas aparat atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan.

Penolakan Omnibus Law

Menolak pengesahan UU Cipta Kerja dengan landasan argumen perlindungan hak asasi buruh, petani, dan lingkungan hidup yang terancam oleh deregulasi investasi.

Konflik Agraria (Wadas & Rempang):

Mengambil sikap tegas menentang pendekatan represif dan militeristik dalam penanganan konflik Proyek Strategis Nasional (PSN). Menuntut penarikan aparat dari lokasi konflik dan pemulihan hak warga yang tergusur paksa.

Reformasi Polri:

Mendorong agenda "Restorasi Polri" pasca-kasus Ferdy Sambo, menuntut perubahan kultur institusi dari kekerasan menjadi pelayanan humanis, serta menggunakan fungsi anggaran untuk menekan perbaikan kinerja HAM kepolisian.

Keadilan Maritim (Pagar Laut):

Melakukan aksi nyata melalui inspeksi mendadak (sidak) dan tekanan politik di parlemen yang berhasil memaksa pembongkaran "Pagar Laut" ilegal di Tangerang-Bekasi demi menyelamatkan mata pencaharian ribuan nelayan.

Kementerian HAM Baru

Mengkritisi rasionalitas pengajuan anggaran fantastis (Rp 20 Triliun) Kementerian HAM di era pemerintahan baru, menekankan agar anggaran difokuskan pada penyelesaian kasus substantif rakyat daripada belanja birokrasi

Berdasarkan analisis komprehensif hingga tahun 2025,

PKS menunjukkan evolusi dalam strategi advokasi HAM:

Perluasan Spektrum Advokasi: PKS tidak hanya fokus pada HAM Sipil-Politik (seperti kasus KM 50 dan ulama), tetapi secara agresif merambah ke HAM Ekonomi-Sosial-Budaya (Ekosob) dan Keadilan Ekologis. Keberhasilan Riyono dalam kasus Giant Sea Wall Tangerang-Bekasi membuktikan kapasitas PKS dalam memenangkan advokasi berbasis data lapangan.

HAM sebagai Instrumen Oposisi dan Koreksi: Meskipun kini berada dalam koalisi, PKS masih menggunakan isu HAM (seperti kritik anggaran Kementerian HAM) untuk menjalankan fungsi checks and balances internal.

Konsistensi pada "Wong Cilik": Benang merah dari Wadas, Rempang, hingga Pagar Laut Pantura adalah pembelaan terhadap kelompok rentan yang tergusur oleh PSN atau korporasi besar. PKS berhasil memframing isu teknis lingkungan menjadi isu keadilan sosial yang fundamental.

5

Integritas Pejabat Publik: Dari Keluarga Hingga Kendali Organisasi







Biro Data dan Perencanaan BP3U DPP PKS Dr. Apiatno, SE, MSi



Dari Mandat ke Kendali

Mengapa Profiling Pejabat Publik Menjadi Agenda Strategis Partai

Euforia yang Terlalu Cepat Usai

Kemenangan politik kerap ditutup dengan rasa lega. Kursi telah diraih, jabatan telah diisi, mandat rakyat dianggap telah diamankan. Namun justru setelah momen itu, pekerjaan paling menentukan dimulai: memastikan kekuasaan berjalan searah dengan tujuan politik organisasi.

Pejabat publik dari partai bukan sekadar pelaksana administrasi negara. Mereka adalah pembawa nilai, penjaga arah, sekaligus wajah partai di hadapan publik. Setiap kebijakan dan layanan yang mereka hasilkan akan dibaca sebagai sikap politik partai secara keseluruhan.

Ketika Jabatan Mengalahkan Organisasi

Jabatan publik menyediakan akses luas pada anggaran, birokrasi, dan jejaring kekuasaan. Tanpa sistem pengelolaan yang tertata, ruang ini mudah berubah

Tanpa profiling yang terstruktur, relasi kuata di internal partai menjadi timpang. Pejabat publik cenderung memiliki posisi tawar lebih kuat diban-dingkan struktur organisasi lainnya, karena sumber daya melekat pada jabatannya.

menjadi arena penguatan kepentingan personal atau kelompok tertentu di dalam partai.

Dampaknya tidak selalu kasat mata, tetapi terasa perlahan: kerja kolektif melemah, disiplin organisasi menurun, dan faksi-faksi eksklusif tumbuh. Tanpa disadari, partai kehilangan kendali atas kader yang justru sedang memegang kekuasaan.

Wajah Partai di Meja Pelayanan Publik

Bagi masyarakat, partai politik hadir melalui pelayanan publik yang mereka rasakan sehari-hari. Kebijakan yang lahir dari pejabat publik menjadi tolok ukur utama dalam menilai partai, jauh lebih nyata dibandingkan narasi ideologis.

Ketika pelayanan publik tidak terarah dan tidak terhubung dengan agenda strategis partai, dukungan politik menjadi rapuh. Profiling pejabat publik dibutuhkan agar kebijakan dan layanan berjalan seiring dengan mandat politik yang diemban.

Ketimpangan Sunyi di Dalam Rumah Sendiri

Tanpa profiling yang terstruktur, relasi kuasa di internal partai menjadi timpang. Pejabat publik cenderung memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan struktur organisasi lainnya, karena sumber daya melekat pada jabatannya.

Dalam situasi ini, struktur partai berisiko kehilangan fungsi kendali. Partai tetap ada secara formal, tetapi tidak lagi efektif dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengoreksi jalannya kekuasaan yang dijalankan kadernya sendiri.

Data yang Hilang, Strategi yang Tersesat

Ketiadaan data dan informasi yang utuh melemahkan kemampuan partai menyusun strategi. Keputusan sering bertumpu pada asumsi, laporan terfragmentasi, atau persepsi sepihak yang tidak terverifikasi.

Akibatnya, strategi politik menjadi reaktif dan terlambat merespons dinamika. Partai tidak memiliki gambaran objektif tentang posisi pejabat publiknya, baik dalam struktur kekuasaan negara maupun dalam dinamika internal organisasi.

Informasi sebagai Alat Kuasa

Situasi menjadi lebih berbahaya ketika keterbatasan data tidak terjadi secara alamiah, tetapi sengaja dipertahankan. Penguasaan informasi berubah menjadi instrumen kekuasaan untuk membatasi akses partai terhadap kondisi riil.

Praktik ini memperkuat posisi tawar individu atau kelompok tertentu dan melemahkan mekanisme kolektif. Dalam senyap, pengambilan keputusan strategis menjadi rentan terhadap manipulasi dan kepentingan sempit.

Profiling sebagai Alat Baca Kekuasaan

Profiling pejabat publik berfungsi sebagai alat membaca dinamika kekuasaan secara sistematis. Ia menyediakan basis data yang terverifikasi untuk mendeteksi perubahan sikap, manuver politik, dan potensi risiko sejak dini.

Lebih dari itu, profiling menjadi dasar pembinaan yang rasional dan terukur. Koreksi dan penguatan dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi krisis yang menyempitkan ruang kendali partai.

Menjaga Arah, Bukan Sekadar Kursi

Agenda Profiling Pejabat Publik disusun sebagai kerangka kerja strategis untuk menjaga konsistensi arah politik, meningkatkan kualitas kinerja pejabat publik, dan memperkuat daya tahan organisasi.



Dengan menjadikan data, pengetahuan, dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, partai menegaskan dirinya sebagai institusi politik yang matang dan bertanggung jawab. Tanpa profiling yang kuat, partai berisiko kehilangan kendali atas kekuasaan yang telah dimenangkan—dan perlahan kehilangan kepercayaan publik.

Kepala Biro Pembinaan Keluarga BP3U DPP PKS **Hj. Nevi Zuairina**

Menata Kebijakan Publik yang Mensejahterakan Rakyat

Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Harapan 2026

Tahun 2025 menutup tirainya dengan banyak catatan—sebagian optimistis, sebagian getir. Di ruang-ruang publik, harapan rakyat terdengar nyaris seragam: harga beras yang stabil, layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, serta lapangan kerja yang memberi martabat, bukan sekadar upah.

Namun harapan itu sering berhenti sebagai slogan. Kebijakan publik hadir, program diluncurkan, anggaran digelontorkan, tetapi dampaknya tak selalu terasa di dapur rumah tangga. Di titik inilah pertanyaan klasik kembali menyeruak: mengapa kebijakan publik kerap gagal menyentuh inti kesejahteraan rakyat?

Jawabannya bukan semata soal rumitnya birokrasi atau keterbatasan fiskal. Lebih dalam dari itu, persoalannya terletak pada nilai dan integritas yang melahirkan kebijakan tersebut. Kebijakan publik bukanlah produk steril. la adalah cermin dari jiwa para pejabat publik—dan jiwa itu, pertama kali, dibentuk di dalam keluarga.

Ketika Keluarga Pejabat Menjadi Etalase Moral

Di era media sosial, kehidupan keluarga pejabat publik tak lagi berada di ruang privat. Setiap unggahan, gaya hidup, hingga komentar sederhana dapat menjadi konsumsi publik. Disadari atau tidak, keluarga pejabat kini hidup dalam sorotan yang nyaris tanpa jeda.

Publik pun menilai pejabat bukan hanya dari isi kebijakan, tetapi dari cara keluarganya hidup. Kesederhanaan atau kemewahan, keharmonisan atau konflik, empati atau jarak—semuanya membentuk persepsi rakyat. Di titik ini, keluarga pejabat publik menjelma etalase moral bagi kebijakan yang mereka lahirkan.

Ketika keluarga pejabat tampil sederhana, bersahaja, dan berorientasi pelayanan, kepercayaan publik menguat. Sebaliknya, ketika keluarga pejabat justru mempertontonkan gaya hidup berjarak dari realitas rakyat, kebijakan sebaik apa pun akan dicurigai.

Kebijakan Publik: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat

Menata kebijakan publik yang mensejahterakan rakyat berarti mengembalikan orientasi kebijakan pada rakyat sebagai subjek, bukan sekadar objek statistik. Ada tiga prinsip utama yang harus ditegakkan.

Pertama, berbasis keluarga.

Kebijakan harus memperkuat keluarga sebagai unit terkecil bangsa. Program pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial harus dirancang dengan perspektif keluarga—bukan hanya individu atau angka agregat.

Kedua, berkeadilan.

Kebijakan publik wajib mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Tidak boleh ada keluarga yang tertinggal hanya karena mereka hidup di pelosok, bekerja di sektor informal, atau berada di luar pusat kekuasaan.

Ketiga, berintegritas.

Kebijakan harus bersih dari konflik kepentingan, nepotisme, dan gaya hidup hedonis pejabat publik. Tanpa integritas, kebijakan hanya menjadi teks administratif yang kehilangan legitimasi moral.

Pesan ini selaras dengan pandangan KH. Hasyim Asy'ari yang menegaskan bahwa keluarga adalah madrasah pertama bagi manusia. Kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, pada akhirnya, harus berangkat dari nilai-nilai keluarga yang kokoh.



Memasuki tahun 2026, optimisme harus dinyalakan kembali, namun dengan pijakan yang lebih realistis dan berakar. Kebijakan publik harus memastikan diri lebih inklusif, menjangkau keluarga di perdesaan, pekerja informal, serta kelompok rentan yang selama ini kerap luput dari perhatian.

PKS dan Mandat Moral Pembinaan Keluarga Pejabat Publik

Di sinilah posisi Partai Keadilan Sejahtera menjadi relevan. Melalui Biro Pembinaan Keluarga Pejabat Publik, PKS memikul mandat moral yang tidak ringan: memastikan keluarga pejabat publiknya menjadi teladan, bukan beban kepercayaan.

Ada beberapa fokus utama dalam pembinaan ini.

Pertama, menegakkan teladan kesederhanaan.

Keluarga pejabat publik didorong untuk hidup bersahaja dan berorientasi pelayanan, bukan kemewahan simbolik.

Kedua, menguatkan ketahanan keluarga.

Tekanan publik, sorotan media, dan ekspektasi sosial membutuhkan fondasi spiritual dan sosial yang kuat agar keluarga pejabat tetap utuh dan berintegritas.

Ketiga, mengintegrasikan nilai ke kebijakan.

Keteladanan keluarga memperkuat legitimasi kebijakan publik. Rakyat lebih percaya pada kebijakan yang lahir dari keluarga yang hidup sesuai nilai yang dikampanyekan.

Keempat, mencegah nepotisme.

Pembinaan etika keluarga menjadi benteng awal untuk menutup celah praktik nepotisme yang merusak keadilan dan kepercayaan publik.

Sejalan dengan itu, Buya Hamka pernah mengingatkan bahwa keluarga yang bahagia adalah benteng bangsa. Maka, pembinaan keluarga pejabat publik bukan sekadar urusan internal partai, melainkan investasi moral jangka panjang bagi bangsa.

Pelajaran 2025: Kebijakan Tanpa Moral Mudah Runtuh

Refleksi akhir tahun 2025 menunjukkan satu hal yang kian jelas: kebijakan publik tanpa fondasi moral akan rapuh. Rakyat tidak hanya menilai isi kebijakan, tetapi juga menilai siapa yang melahirkannya.

Ketika keluarga pejabat publik tampil sebagai teladan, rakyat lebih

mudah percaya bahwa kebijakan yang dihasilkan lahir dari niat tulus untuk kesejahteraan bersama—bukan kepentingan sempit.

Menjemput 2026 dengan Optimisme yang Berakar

Memasuki tahun 2026, optimisme harus dinyalakan kembali, namun dengan pijakan yang lebih realistis dan berakar. Kebijakan publik harus memastikan diri lebih inklusif, menjangkau keluarga di perdesaan, pekerja informal, serta kelompok rentan yang selama ini kerap luput dari perhatian.

Pada saat yang sama, keluarga pejabat publik dituntut hadir sebagai inspirasi—dalam kesederhanaan, integritas, dan semangat pelayanan. Dan PKS, melalui pembinaan keluarga pejabat publik, diharapkan konsisten meneguhkan diri sebagai penggerak moral politik: tidak hanya bicara kebijakan, tetapi juga membangun fondasi etik bangsa.

Pesan Nelson Mandela terasa relevan hingga hari ini: tidak ada yang lebih penting bagi sebuah bangsa selain membangun keluarga yang kuat. Kesejahteraan rakyat memang berawal dari kebijakan, tetapi kebijakan yang berdaya guna selalu berakar pada keluarga yang kokoh.

Epilog: Menata Nilai, Merawat Kepercayaan

Refleksi akhir tahun 2025 menegaskan satu hal penting: kesejahteraan rakyat



tak bisa dilepaskan dari keteladanan keluarga pejabat publik. Menata kebijakan publik berarti menata nilai, integritas, dan orientasi pelayanan.

Melalui pembinaan keluarga pejabat publik, PKS meneguhkan komitmen bahwa kesejahteraan rakyat dimulai dari keluarga yang beretika dan berorientasi pengabdian. Tahun 2026 selayaknya menjadi momentum optimisme—saat kebijakan publik yang mensejahterakan rakyat ditopang oleh keluarga pejabat publik yang benar-benar layak diteladani.

6

Kemanusiaan Tanpa Musim: Dari Respons Cepat Ke Pemulihan







SEKJEN DPP PKS **H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si.**

Sekjen PKS Resmikan Instalasi Air Bersih dan Listrik Tenaga Surya di Aceh Tamiang



Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, meresmikan Instalasi Air Bersih dan Listrik Tenaga Surya di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, serta Pesantren Fajrulsalam, Desa Menang Gini, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Jumat (9/1/2026).

Fasilitas ini merupakan bagian dari upaya pemulihan dan penanggulangan dampak pascabencana banjir yang

melanda sejumlah wilayah di Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.

Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan infrastruktur dasar dan mengganggu akses masyarakat terhadap air bersih serta listrik.

Menyikapi kondisi tersebut, DPP PKS menghadirkan solusi berkelanjutan dengan membangun fasilitas air bersih melalui pengeboran sumur serta pemasangan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga.

Melalui pengeboran air bersih dan pemasangan panel surya, PKS berupaya menghadirkan solusi yang lebih stabil dan berkelanjutan agar masyarakat dan para santri kembali memperoleh akses kebutuhan dasar yang layak.

Bukan sekadar bantuan darurat, langkah ini menjadi bagian dari komitmen PKS untuk terus membersamai rakyat, dari masa tanggap bencana hingga pemulihan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Muhammad Kholid Apresiasi Servis Motor Gratis untuk Korban Bencana di Aceh Tamiang

Sekjen PKS, Muhammad Kholid mengapresiasi layanan servis motor gratis di Aceh Tamiang. "Saya mengapresiasi layanan servis motor gratis ini sebagai sebuah terobosan nyata di tengah kondisi darurat. Ini langkah kecil namun tepat sasaran".

Hal tersebut disampaikan saat datang ke lokasi bersama rombongan DPP PKS. Jumat, (9/1/2026).

Kedatangan tersebut selain untuk melihat langsung situasi terkini Aceh Tamiang yang masih jauh dari pulih pascabencana, membawa bantuan, juga untuk memantau kerja Relawan PKS Berkeahlian Khusus yang dikirimkan DPP PKS pekan sebelumnya.

Menyambangi Posko Bantuan Kemanusiaan PKS yang sekaligus Kantor DPTD PKS Kabupaten Aceh Tamiang. Sekjen PKS mengungkapkan ada layanan untuk masyarakat, antara lain layanan servis motor gratis, layanan logistik, sembako, obat-obatan, dan juga pakaian, alat-alat sekolah, alat-alat dapur, serta dapur umum.

Layanan servis motor gratis adalah sebuah layanan sederhana namun memiliki dampak besar bagi masyarakat terdampak.

"Banyak motor berjejer antre untuk diservis. Para Relawan PKS begitu

PKS membangun instalasi air bersih (sumur bor) dan listrik tenaga surya di Desa Landuh dan Pesantren Fajrulsalam sebagai solusi jangka panjang pascabencana banjir.

> Bukan sekadar bantuan darurat, langkah ini menjadi bagian dari komitmen PKS untuk terus membersamai rakyat, dari masa tanggap bencana hingga pemulihan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat."

cekatan mengutak-atik mesin motor. Motor-motor yang sebelumnya mati dan tak bisa digunakan, perlahan kembali menyala berkat tangan-tangan Relawan PKS," seperti yang diceritakan Muhammad Kholid di akun Instagram @mas.kholid_

Mas Kholid juga menambahkan bagaimana bermanfaatnya motor bagi warga terdampak. Bukan sekadar kendaraan, tetapi penopang utama aktivitas harian untuk bekerja, mengantar keluarga, hingga memenuhi kebutuhan hidup pascabencana.

"Saya berbincang langsung dengan para relawan PKS yang setiap hari melayani warga. Mereka menyampaikan soal terbatasnya ketersediaan suku cadang dibandingkan bengkel resmi. Tapi mereka tetap berupaya maksimal. Setiap hari, ada sekitar lima sepeda motor yang diservis dengan waktu perbaikan yang beragam sesuai tingkat kerusakan," pungkasnya.

Kader-kader PKS selalu berjuang, selalu melayani masyarakat. Aceh adalah saudara-saudara kita, teman-teman di Aceh membutuhkan uluran dan support dari kita semuanya.

PKS bersama masyarakat Aceh dan Sumatera.



Kerja Kemanusiaan Tidak Boleh Musiman

Wawancara dengan Taufik Jayadi (Bang TJ) - Dari Respon Cepat ke Pemulihan Bermartabat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) boleh dibilang sudah lama menempatkan kerja-kerja kemanusiaan sebagai jantung gerak politiknya. Dalam setiap bencana besar—banjir, gempa, longsor, hingga kebakaran permukiman—jejaring relawan PKS hampir selalu muncul lebih awal, bekerja senyap, dan bertahan lebih lama. Bukan sekadar hadir di fase darurat, tetapi ikut membersamai warga di fase yang sering luput dari sorotan kamera: pemulihan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pola kerja itu makin terlihat matang. Penanganan bencana tidak lagi berhenti pada pembagian bantuan logistik atau dapur umum, tetapi bergerak ke arah yang lebih sistematis dan berjangka panjang. Dari hunian sementara,



pendampingan psikososial, hingga pemulihan ekonomi warga. Sebuah pendekatan yang memadukan empati, manajemen lapangan, dan kesadaran bahwa bencana tidak selesai ketika air surut.

Pasca bencana besar di sejumlah wilayah Sumatra, fokus itu kembali diuji. Ketika sebagian relawan dari berbagai pihak mulai berkurang intensitasnya, PKS justru memilih bertahan. Sudah lebih dari sebulan, kerja-kerja kemanusiaan masih terus berjalan. Bukan dengan narasi heroik, melainkan lewat pekerjaan teknis yang melelahkan: membersihkan lumpur, memperbaiki kendaraan warga, memastikan masjid kembali bisa digunakan, dan mendata keluarga yang kehilangan tempat tinggal.

Di lapangan, kerja kebencanaan ini dikomandoi oleh struktur yang relatif rapi. Relawan datang dari berbagai daerah, dengan keahlian yang disesuaikan kebutuhan. Ada montir, tenaga medis, tim psikososial, hingga relawan dapur umum. Semuanya bergerak dalam satu irama: membantu warga kembali ke kehidupan normal, sejauh yang mungkin.

Untuk memahami bagaimana kerja ini dijalankan dan ke mana arahnya, Majalah Sinergi berbincang dengan Taufik Jayadi, yang akrab disapa Bang TJ. Ia terlibat langsung mengoordinasikan fase pascabencana—fase yang menurutnya justru paling menentukan.

Bertahan Setelah Sorotan Pergi

Majalah Sinergi: *Bang TJ, biasanya setelah sebulan bencana, perhatian mulai berkurang. Apa yang PKS lakukan di fase ini?*

Taufik Jayadi: Justru di fase inilah kerja sebenarnya dimulai. Setelah lebih dari sebulan, PKS masih fokus pada pendampingan masyarakat. Kami mengirim relawan, bukan hanya dari wilayah Sumatra, tetapi juga dari luar Sumatra. Di saat yang sama, relawan lokal dari kabupaten yang tidak terdampak juga kami libatkan. Prinsipnya rotasi dan kolaborasi, supaya tidak terjadi kelelahan sosial.

Majalah Sinergi: Relawan yang dikirimkan ini spesifik keahlian?

Taufik Jayadi: Betul. Kami tidak mengirim relawan secara acak. Ada montir mobil dan motor karena kendaraan warga banyak yang terendam lumpur. Ada tim psikososial untuk anak-anak dan ibu-ibu. Ada tim medis. Ada juga tim yang fokus ke distribusi logistik dan dapur umum. Semua disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Dari Bengkel Darurat hingga Masjid Kembali Hidup

Majalah Sinergi: Apa fokus kerja paling menonjol sejauh ini?

Taufik Jayadi: Salah satunya service kendaraan. Banyak motor dan mobil warga yang sebenarnya masih bisa

> Kami ingin mendokumentasikan praktik baik, menyusun modul standar—dari respon bencana, pemulihan, sampai huntara—dan memperkuat jejaring dengan aparat, ormas, dan lembaga kemanusiaan.

diselamatkan. Kami buka layanan service gratis. Alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa. Mereka datang ke posko membawa kendaraannya. Bahkan sempat kewalahan karena jumlahnya banyak sekali.

Selain itu, kami fokus membersihkan masjid dan musholla yang terendam lumpur. Bagi kami ini penting. Ketika masjid kembali bisa dipakai sholat berjamaah dan anak-anak bisa mengaji lagi, itu tanda kehidupan sosial mulai pulih.

Kami juga membantu warga membersihkan rumah dari lumpur yang cukup dalam. Tidak semua rumah rusak berat, tapi lumpur membuat rumah tidak layak huni. Ini kerja fisik yang berat dan butuh waktu.

Majalah Sinergi: *Bagaimana dengan daerah yang terisolir?*
Taufik Jayadi: Distribusi logistik tetap berjalan untuk daerah terisolir. Akses memang tidak selalu mudah, tapi ini kewajiban. Dapur umum juga kami jalankan, bukan hanya untuk warga, tetapi juga untuk relawan, supaya ritme kerja tetap terjaga.

Huntara: Dari Darurat ke Martabat
Majalah Sinergi: *Setelah fase ini, apa langkah berikutnya?*
Taufik Jayadi: Kami masuk ke fase hunian sementara atau huntara. Untuk warga yang rumahnya hancur berat, PKS berupaya membantu dengan menyewakan kontrakan atau membangun huntara di tanah keluarga atau lahan yang aman dan legal. Prinsipnya sederhana: sementara, tapi tetap manusiawi.

Program Jangka Menengah: Menata Ulang Kehidupan
Majalah Sinergi: *PKS juga menyiapkan program jangka menengah?*
Taufik Jayadi: Iya. Dalam 0–6 bulan, fokus kami ada empat hal besar. Pertama, pemulihan fungsi hidup dasar. Layanan teknis masyarakat kami lanjutkan—service kendaraan lanjutan,

pendampingan alat rumah tangga seperti pompa dan genset kecil, rehabilitasi rumah ringan, sampai reaktivasi masjid, musholla, dan tempat belajar anak.

Kedua, penguatan psikososial dan ketahanan keluarga. Pendampingan anak dan ibu harus berkelanjutan, bukan sekali datang lalu selesai. Trauma healing kami lakukan berbasis masjid dan komunitas, ditambah kajian ringan untuk penguatan ruhiyah.

Ketiga, program huntara yang lebih terstruktur. Kami buat standar: legal, aman dari bencana susulan, dan layak huni. Ada pendataan prioritas, terutama lansia, ibu dengan anak kecil, dan rumah rusak berat.

Keempat, penguatan relawan. Kami atur rotasi nasional supaya tidak burnout. Relawan lokal juga kami latih soal manajemen posko, distribusi logistik, dan pelayanan masyarakat. Semua kegiatan didata dan dilaporkan dengan rapi.

Dari Bertahan ke Mandiri

Majalah Sinergi: Lalu bagaimana arah jangka panjangnya?

Taufik Jayadi: Di 6–12 bulan atau satu tahun, fokus bergeser ke pemulihan ekonomi. Masyarakat harus kembali mandiri. Kami bantu alat kerja untuk nelayan, petani, pedagang kecil, bengkel rumahan. Ada modal usaha mikro terbatas dan pendampingan UMKM. Kami juga dorong program padat karya sosial untuk membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas umum.

Kami ingin transisi dari huntara ke hunian lebih permanen. Bukan membangun sendiri, tapi mendampingi dan berkolaborasi. Ada edukasi rumah tahan bencana dan pendampingan legalitas tanah jika diperlukan.

Di tingkat desa, kami dorong konsep desa tangguh bencana. Ada pelatihan kebencanaan berbasis desa dan masjid, pembentukan relawan siaga lokal, edukasi jalur evakuasi, sampai simulasi sederhana.

Kerja Kemanusiaan sebagai Sistem

Majalah Sinergi: Apa benang merah dari semua ini?

Taufik Jayadi: Arah besar PKS jelas: dari respon cepat, ke pemulihan bermartabat, menuju kemandirian masyarakat, lalu ketangguhan jangka panjang. Kerja kebencanaan tidak boleh reaktif dan sesaat. Harus jadi sistem.

Kami ingin mendokumentasikan praktik baik, menyusun modul standar—dari respon bencana, pemulihan, sampai huntara—dan memperkuat jejaring dengan aparat, ormas, dan lembaga kemanusiaan.

Bagi kami, kemanusiaan bukan panggung. Ia adalah proses panjang. Bukan hanya hadir saat darurat, tapi menemani masyarakat sampai benar-benar bangkit.

Di situlah politik menemukan maknanya yang paling sunyi, tapi paling manusiawi.

7

Esei Analisis Psikologi Politik





Ketua BP3U DPP PKS) Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

Merawat Api yang Hampir Padam: Sebuah Anatomi Psikologis Kader

Pendahuluan: Di Antara Kelelahan dan Makna

Dalam lorong-lorong panjang perjuangan politik, ada satu hantu yang kerap tidak diakui namun nyata dirasakan: kelelahan batin. Literatur psikologi organisasi menyebutnya burnout, namun dalam bahasa pergerakan, ini adalah meredupnya burning desire—sebuah dorongan purba yang membuat seseorang bertahan meski jalanan terjal dan panggung tak menyediakan tepuk tangan.



Penurunan gairah di tubuh organisasi kader seperti Partai Keadilan Sejahtera, bukanlah sebuah anomali. Ia adalah konsekuensi logis ketika mesin organisasi mulai berderit lebih keras daripada detak jantung penghuninya. Max Weber, sosiolog Jerman itu, jauh hari sudah mengingatkan tentang "kerangkeng besi" birokrasi yang bisa mematikan jiwa. Ketika makna memudar, dampak kerja tak kasat mata, dan harapan membumbung terlalu jauh

dari realitas, kader bukan lagi pejuang. Mereka berubah menjadi sekrup-sekrup mesin yang dingin.

Krisis ini, jika kita membedahnya dengan pisau bedah psikologi, bukanlah soal lunturnya nilai. Nilai itu masih di sana, suci dan agung. Masalahnya adalah kegagalan menerjemahkan nilai langit itu ke dalam pengalaman psikologis yang membumi. Inilah anatomi persoalannya.

Mengembalikan "Mengapa", Bukan Sekadar "Apa"

Sebuah organisasi modern sering kali terperangkap dalam obsesi target. Angka-angka, kurva elektoral, dan laporan kegiatan menjadi tuhan-tuhan kecil. Namun, Self-Determination Theory dari Deci dan Ryan (2000) mengajarkan kita satu hal fundamental: manusia bukanlah mesin input-output. Motivasi yang paling purba dan tahan banting bersumber dari internalisasi nilai—saat seseorang merasa apa yang ia kerjakan selaras dengan siapa dirinya.

Ketika narasi organisasi hanya berkutat pada target (WHAT) dan melupakan makna (WHY), yang tumbuh adalah "motivasi terkendali"—patuh karena instruksi, bukan bergerak karena panggilan. Viktor Frankl, yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, membuktikan tesis ini dalam Man's Search for Meaning. Manusia sanggup menanggung penderitaan paling brutal sekalipun, asalkan ia tahu apa maknanya.

Maka, menyalakan kembali api kaderisasi bukanlah dengan menambah checklist tugas, melainkan mengajak mereka menengok ke dalam: merekonstruksi alasan eksistensial mengapa mereka ada di jalan ini. Api itu padam bukan karena tubuh yang lelah, tapi karena jiwa yang kehilangan "mengapa".

Jejak Nyata di Atas Kertas Kerja

Ada bahaya laten dalam kerja-kerja politik yang abstrak: kita bekerja keras, tapi tak melihat dampaknya. Dalam teori Expectancy–Value (Vroom, 1964), motivasi adalah hasil kali antara usaha

Hubungan yang transaksional akan pecah saat logistik menipis. Namun, hubungan yang didasari rasa senasib sepenanggungan—solidaritas organik—adalah benteng terakhir."



dan hasil yang terlihat. Jika kader terus berlari tapi merasa berjalan di tempat—apa yang disebut Martin Seligman sebagai learned helplessness—kelumpuhan mental akan terjadi.

Adam Grant (2007) menunjukkan bahwa motivasi prososial meledak ketika seseorang melihat langsung wajah orang yang dibantunya. Bukan sekadar data statistik penerima bantuan, tapi senyum nyata, jabat tangan hangat, dan perubahan hidup yang konkret.

Perayaan kemenangan-kemenangan kecil (small wins) bukanlah narsisme organisasi; itu adalah mekanisme psikologis untuk membuktikan bahwa lelah mereka tidak sia-sia. Manusia perlu tahu bahwa keringatnya mengubah sesuatu.

Harapan yang Membumi, Bukan Mimpi di Siang Bolong

Antara optimisme dan delusi ada batas tipis. C.R. Snyder dalam Hope Theory-nya (2002) merumuskan harapan bukan sekadar "yakin menang", melainkan kombinasi antara tujuan yang jelas (goals) dan jalan yang masuk akal (pathways). Visi besar tanpa peta jalan

yang realistis hanya akan melahirkan sinisme.

Kader adalah manusia cerdas yang bisa membaca realitas. Ketika pimpinan menjual mimpi yang tidak kredibel, kepercayaan psikologis runtuh. Dan seperti dicatat Dirks & Ferrin (2002), tanpa kepercayaan, komitmen jangka panjang hanyalah ilusi. Kejujuran mengenai beratnya tantangan—tanpa kehilangan orientasi moral—justru lebih membakar semangat ketimbang janji-janji surga yang terdengar sumbang. Harapan yang jujur adalah bahan bakar; harapan palsu adalah racun.

Resonansi Keteladanan

Albert Bandura (1977) lewat Social Learning Theory menegaskan: manusia adalah makhluk peniru. Di sebuah organisasi, satu tindakan nyata pemimpin berbunyi lebih nyaring daripada seribu instruksi di grup WhatsApp.

Gaya kepemimpinan transformasional, yang menekankan pengaruh ideal (idealized influence), menjadi kunci. Burning desire itu menular. Ia adalah virus sosial. Jika pemimpinnya lesu, pragmatis, dan transaksional, jangan harap kadernya militan. Motivasi tidak diturunkan lewat briefing subuh, tapi lewat observasi diam-diam kader terhadap pimpinannya: apakah ia orang yang paling awal datang dan paling akhir pulang? Keteladanan adalah mata uang yang tak terkena inflasi.

Manusia, Bukan Sekadar Alat

Salah satu dosa terbesar organisasi hierarkis adalah mereduksi manusia menjadi alat produksi. Padahal, kebutuhan psikologis dasar manusia adalah otonomi (Deci & Ryan, 2000). Kader yang diperlakukan semata-mata sebagai pelaksana instruksi "atas ke bawah" perlahan akan mengalami kematian kreativitas.

Studi tentang kepemimpinan yang memberdayakan (empowering leadership) menunjukkan bahwa ketika kader diberi ruang untuk berinisiasi, diakui gagasannya, dan diperlakukan sebagai subjek perjuangan, daya tahannya meningkat pesat. Mereka perlu merasa memiliki pertempuran ini, bukan sekadar prajurit yang disuruh mati konyol.

Ukhuwah sebagai Energi, Bukan Formalitas

Emile Durkheim, bapak sosiologi itu, menyebut ritual kebersamaan sebagai sumber "energi emosional kolektif". Dalam konteks PKS, ini adalah ukhuwah. Namun, ukhuwah yang hanya berhenti pada level administratif—hadir rapat, bayar iuran, selesai—tidak akan cukup menahan beban perjuangan jangka panjang.

Randall Collins (2004) dan riset tentang burnout (Maslach & Leiter, 2016) mengonfirmasi bahwa ikatan emosional yang autentik adalah penyangga utama saat krisis. Hubungan yang transaksional akan pecah saat

logistik menipis. Namun, hubungan yang didasari rasa senasib sepenanggungan—solidaritas organik—adalah benteng terakhir. Kader bertahan bukan (hanya) karena visi partai, tapi karena mereka tidak ingin meninggalkan kawan seperjuangannya sendirian.

Membungkus Nilai Lama dengan Bahasa Zaman

Nilai mungkin abadi, tapi bahasa adalah produk sejarah. Teori pembingkaian (framing) dalam gerakan sosial mengingatkan bahwa keberhasilan mobilisasi bergantung pada relevansi narasi. Menggunakan retorika tahun 90-an untuk menyentuh hati generasi Z adalah kesia-siaan.

Ini bukan soal menggadaikan prinsip, tapi soal resonansi emosional. Kisah-kisah konkret, bahasa pelayanan yang menyentuh keseharian, serta orientasi pada masa depan keluarga dan kota, jauh lebih menggetarkan daripada jargon-jargon ideologis yang mengawang. Nilainya tetap Islam, tetap perbaikan, tapi "kemasan"-nya harus berbicara pada kecemasan dan harapan hari ini.

Penutup: Menjaga Bara di Tengah Angin

Secara konseptual, burning desire itu sejatinya tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertimbun abu rutinitas, tercekik oleh struktur yang cenderung kaku, dan kehilangan oksigen makna.

Sebab pada akhirnya, gerakan ini bukan dibangun oleh bata dan semen, melainkan oleh kepingan-kepingan jiwa yang percaya bahwa masa depan masih layak diperjuangkan."

Tugas kepemimpinan hari ini bukanlah berteriak lebih keras agar kader berlari, melainkan menjadi arsitek jiwa: menciptakan ekosistem di mana makna dirayakan, dampak dirasakan, dan hubungan manusiawi diutamakan. Membangkitkan gairah kader bukanlah pekerjaan retorika di atas mimbar. Ia adalah kerja sunyi merekayasa harapan dan merawat kemanusiaan.

Sebab pada akhirnya, gerakan ini bukan dibangun oleh bata dan semen, melainkan oleh kepingan-kepingan jiwa yang percaya bahwa masa depan masih layak diperjuangkan.

Analisis ini disarikan dari sintesis berbagai literatur perilaku organisasi dan psikologi sosial, termasuk karya Bandura, Frankl, Snyder, hingga Deci & Ryan.

Epilog: Politik Yang Melayani

Dari tumpukan analisis, refleksi sejarah, hingga laporan lapangan dalam buku ini, satu benang merah terjalin: politik sejatinya adalah alat untuk melayani.

Baik itu melalui keteguhan ideologi seperti Natsir, keberanian membela HAM, ketelitian menyusun anggaran daerah, keteladanan keluarga pejabat, hingga tangan yang berlumur oli saat memperbaiki motor korban banjir—semuanya adalah wajah dari satu tubuh bernama Indonesia yang kita cita-citakan.

Semoga buku ini menjadi pengingat, bahwa di ujung setiap kebijakan, ada nasib rakyat yang dipertaruhkan.



Kedewasaan para elite

sangat membantu dalam menghargai proses politik yang sedang berlangsung. Mereka menjadikan pemilu sebagai kontestasi ide dan gagasan untuk merebut hati masyarakat, ketimbang menggunakan isu SARA untuk menyerang lawan politik dan menggunakan politik transaksional (money politic) untuk membeli suara masyarakat.

